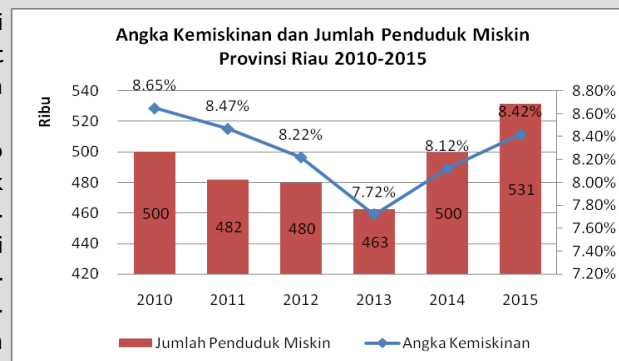


Strategi Penanggulangan Kemiskinan Berbasis Data Kemiskinan Multidimensi Di Kabupaten Indragiri Hulu

Pendahuluan

Pertumbuhan ekonomi yang tinggi akan tetapi tidak berdampak terhadap peningkatan kesejahteraan kelompok berpendapatan rendah atau masyarakat miskin. Sesuai dengan studi Martin Ravallion (2001), kondisi ini yang disebut dengan jebakan pertumbuhan ekonomi terhadap kemiskinan. Tidak selamanya pertumbuhan ekonomi berkontribusi positif terhadap perbaikan ketimpangan dan kemiskinan.



Sumber : BPS Provinsi Riau 2015

Kasus ini ditemukan di Propinsi Riau yang merupakan daerah dengan potensi Sumberdaya Alam (SDA) yang besar baik disektor pertambangan (Migas dan Minerba), kehutanan, perkebunan. Pertumbuhan ekonomi Riau berada diatas rata-rata pertumbuhan ekonomi nasional, yaitu mencapai 7-8% pertahun.

Tingginya angka pertumbuhan ekonomi, serta besarnya potensi SDA yang dimiliki tentunya berpengaruh terhadap tingginya kemampuan fiskal daerah, seharusnya persoalan kemiskinan bukan lagi menjadi masalah utama daerah. Akan tetapi, sampai Maret 2015, total penduduk miskin di Provinsi Riau masih besar yaitu 531.390 jiwa atau sebesar 8,42% dari total penduduk yang ada. Bahkan, trend angka kemiskinan justru terus mengalami peningkatan tiga tahun terakhir. Angka kemiskinan Riau juga masih cukup tinggi dibanding Propinsi lain seperti Sumatera Barat.

Hal yang sama juga terjadi di Kabupaten Indragiri Hulu. Perekonomian di Kabupaten ini dalam beberapa tahun terakhir mengalami per-

tumbuhan yang besar yaitu 8% pertahun. Selain itu, potensi ekonomi yang berasal dari sektor pertambangan, perkebunan dan perdagangan, masih mengalami pertumbuhan yang tinggi. Tapi ironis, tingkat kemiskinan di Kabupaten Indragiri Hulu masih berada pada angka 7,50%. Angka ini juga meningkat dari tahun sebelumnya yaitu 7,13%.

Hal ini menjadi problema dalam pembangunan daerah. Satu sisi perkembangan

ekonomi daerah berjalan baik, tapi *trickle-down effect* terhadap kemiskinan tidak berjalan optimal. Artinya, ada yang salah dalam kebijakan pembangunan daerah dan program penanggulangan kemiskinan yang selama ini dilakukan oleh pemerintah daerah.

Bila menelisik dari sisi program dan kebijakan fiskal di Pemerintah Kabupaten Inhu, ada paradoks dalam efektifitas program penanggulangan kemiskinan. Satu sisi, pemerintah intensif merancang program dan mengalokasikan anggaran untuk penanggulangan kemiskinan. Tapi, disisi lain, penurunan kemiskinan tidak optimal, malahan cenderung mengalami kenaikan. Hasil evaluasi yang dilakukan oleh Fitra Riau (2015) menunjukkan bahwa terjadi inefisiensi program seperti ketidaktepatan dalam target penerima program, tujuan program yang tidak jelas dan masalah tidak adanya integrasi program antar SKPD. Hal ini terjadi karena tidak adanya data kemiskinan yang valid dan terintegrasi di daerah.

Kompleksitas persoalan data kemiskinan di Indonesia, menjadi sebuah persoalan klasik yang berdampak luas terhadap efektifitas program penanggulangan kemiskinan. Studi Perkumpulan Prakarsa (2015) menunjukkan bahwa semakin tahun anggaran untuk program penanggulangan kemiskinan meningkat signifikan tapi efektifitas dalam mengeluarkan masyarakat miskin dari kemiskinan semakin menurun. Artinya, ada persoalan dalam penetapan sasaran program penanggulangan kemiskinan. Dan ini terkait dengan persoalan data kemiskinan.

Berbicara data kemiskinan, berkaitan dengan metode pengukuran kemiskinan. Pemerintah sudah mengintroduksir data Program Perlindungan Sosial (PPLS) sebagai basis data penetapan penerima program. Tapi, persoalannya adalah terkait dengan metode pengukuran PPLS yang belum mampu menjangkau kondisi kemiskinan secara keseluruhan. Sementara data PPLS juga tidak bisa update tiap tahun.

Evaluasi terhadap pencapaian program juga menjadi kelemahan data PPLS, karena data PPLS merupakan data mikro yang pendataannya tidak dilakukan setiap tahun. Sedangkan untuk melihat perkembangan angka kemiskinan setiap tahun diperlukan data makro. Data ini sudah disediakan setiap tahun oleh BPS melalui Survey Sosial Ekonomi Nasional (Susenas). Dan setiap tahun BPS mempublikasikan angka kemiskinan di Indonesia tapi menggunakan pendekatan konsumsi yang hanya satu dimensi.

Sebenarnya, kemiskinan itu memiliki berbagai karakteristik dan bersifat multidimensi. Persoalan kemiskinan yang ada di Kabupaten Inhu akan berbeda dengan persoalan kemiskinan yang ada di Kabupaten Indragiri Hilir. Mereka memiliki karakteristik sendiri yang tidak bisa diukur dalam satu dimensi. Perlu sebuah alat ukur yang bersifat multidimensi, sehingga bisa lebih mampu menjangkau dan memotret kondisi atau karakteristik yang terjadi di dalam masyarakat miskin.

Tujuan

Tujuan dari policy brief ini disusun adalah :

- Menghitung kemiskinan di Kabupaten Inhu dengan pendekatan kemiskinan multidimensi
- Menganalisis karakteristik kemiskinan multidimensi di Kabupaten Inhu
- Mendesain strategi, kebijakan dan program penanggulangan kemiskinan berbasis kemiskinan multidimensi sebagai tawaran kebijakan Strategi Penanggulangan Kemiskinan Daerah (SPKD) Indragiri Hulu kedepan.

Pendekatan multidimensi dalam mengukur kemiskinan, sebenarnya sudah berkembang saat ini. *Oxford Poverty and Human Development Initiative (OPHI)* sudah mengembangkan *Multidimensional Poverty Approach* sebagai instrumen dalam mengukur kemiskinan. OPHI mengembangkan konsep ini untuk mengukur angka kemiskinan (*headcount*) multidimensi, intensitas kemiskinan multidimensi dan indeks kemiskinan multidimensi (*Multidimensional Poverty Index/MPI*).

Pendekatan kemiskinan multidimensi yang dikembangkan oleh OPHI terdiri dari tiga dimensi yaitu kesehatan, pendidikan dan standar kualitas hidup. Setiap dimensi terdiri dari beberapa indikator. Dimensi kesehatan terdiri dari dua indikator yaitu gizi anak dan kematian anak. Dimensi pendidikan terdiri dari lama pendidikan (*years of schooling*) dan partisipasi pendidikan (*attendance of school*). Sedangkan dimensi standar kualitas hidup (*standard of living*) terdiri dari sumber energi untuk memasak, sanitasi, air bersih, sumber penerangan, kondisi lantai rumah dan kepemilikan asset (Alkire & Foster, 2012).

Perkembangan selanjutnya, OPHI melihat bahwa masing – masing Negara memiliki karakteristik kemiskinan sendiri. OPHI mengembangkan dimensi dan indikator kemiskinan multidimensi sesuai dengan kondisi dan karakteristik kemiskinan yang terjadi di setiap Negara. Dan menariknya, indikator kemiskinan multidimensi sudah disepakati dalam *Sustainable Development Goals (SDGs) 2030*. Salah satu tujuannya adalah penurunan kemiskinan global termasuk di Indonesia.

Indonesia salah satu Negara yang mengadopsi pendekatan ini ke depan. Sehingga, perlu sebuah kajian di level daerah untuk memotret kondisi kemiskinan multidimensi di daerah. Instrumen ini bisa digunakan oleh Kabupaten Inhu untuk mendesain strategi penanggulangan kemiskinan berbasis data kemiskinan multidimensi.

Metode Perhitungan Kemiskinan MPI

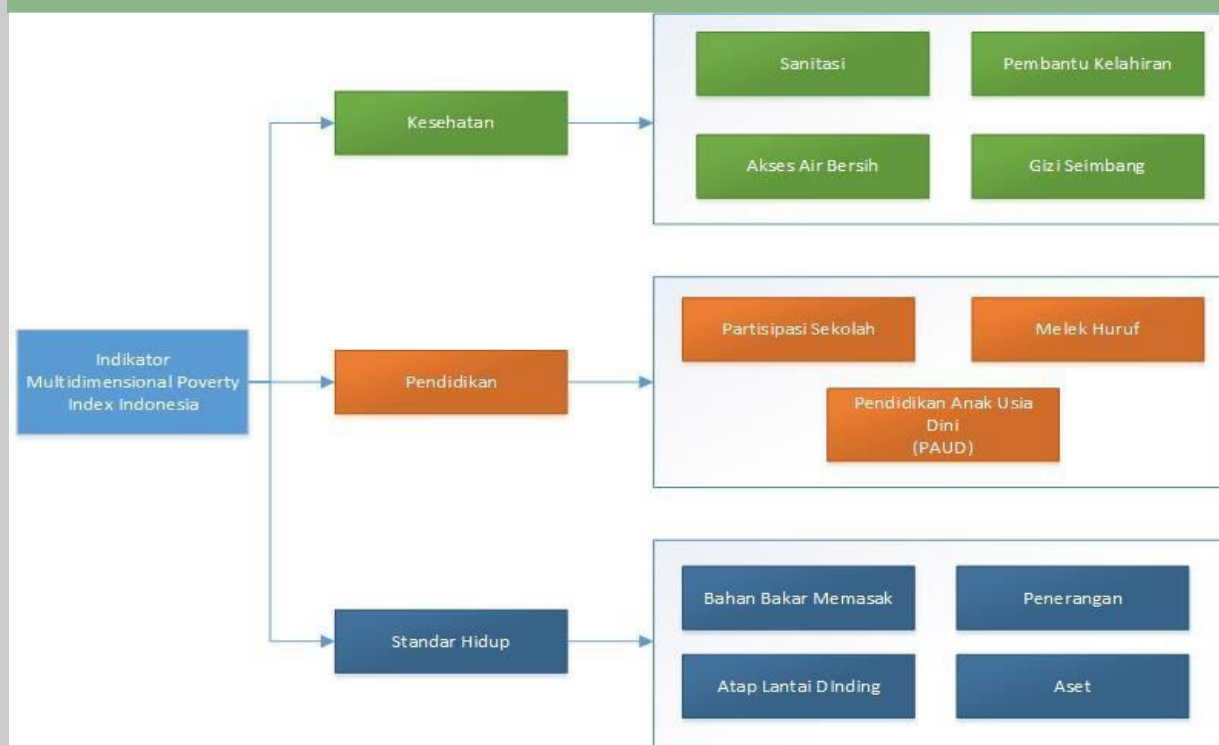
Pendekatan kemiskinan multidimensi pertama kali dikembangkan oleh OPHI pada tahun 2010. Dimana tujuan dari MPI ini adalah untuk memotret kondisi kemiskinan secara lebih holistik. Selama ini, indikator secara global yang banyak digunakan dalam menghitung angka kemiskinan adalah melalui pendekatan moneter seperti garis kemiskinan dengan batas USD. 1.25 Purchasing Power Parity (PPP), USD. 1.5 PPP atau melalui pendekatan konsumsi dasar (*basic need*) yang digunakan di Indonesia.

Bagi UNDP, MPI merupakan bagian yang terintegrasi dalam kerangka *Sustainable Development Goals* (SDGs) yang sudah diajukan oleh Perserikatan Bangsa - Bangsa (PBB) sebagai salah satu indikator SDGs. Timbulnya kekhawatiran secara global dalam penyelesaian masalah kemiskinan merupakan ide awal dari MPI. UNDP melihat bahwa memperluas indikator kemiskinan dan melihat kemiskinan secara multidimensi merupakan strategi awal dalam kerangka penanggulan-

gan kemiskinan global. Selama ini persoalan kemiskinan dijawab oleh cakupan indikator yang sempit sehingga strategi penanggulangan kemiskinan menjadi sempit juga.

MPI merupakan alat ukur yang praktis terhadap kemiskinan. MPI bisa digunakan: untuk penambah dan pembandingan alat ukur kemiskinan yang selama ini dipakai dalam pengambilan kebijakan seperti indikator pendapatan, untuk memantau tingkat kemiskinan dan komposisi kemiskinan serta pengurangan kemiskinan dari waktu ke waktu, untuk mengevaluasi dampak dari program, untuk memetakan kondisi riil dari kemiskinan terhadap semua aspek (multidimensi) seperti kesehatan, pendidikan dan standar kualitas hidup, untuk mengidentifikasi jebakan kemiskinan dan kemiskinan kronis, untuk membandingkan kondisi kemiskinan dari berbagai aspek seperti aspek kewilayahan, kelompok etnis, gender, rumah tangga dan lainnya.

Gambar 1.
Dimensi dan Indikator MPI Indonesia



Dalam perhitungan MPI di Indonesia memakai tiga dimensi yaitu dimensi kesehatan, pendidikan dan standar kualitas hidup dan terdapat total 11 indikator. Sesuai dengan metoder Alkire Foster yang membebaskan pemakaian indikator maka kami menyesuaikan ketersediaan data dengan indikator yang dapat menjadi representasi di Indonesia.

Tabel I. Dimensi dan Indikator MPI Indonesia

NO	DIMENSI	INDIKATOR	DEFINISI INDIKATOR	TRESHOLD	JUSTIFIKASI
1	Kesehatan	Sanitasi	Rumah tangga dengan kondisi sanitasi yang tidak layak	Rumah tangga dengan tempat pembuangan air besar tidak ada, umum, bersama dan sendiri. Jika sendiri dengan jenis kloset cemplung atau tidak pakai kloset.	MDGs 2015 dan standar sanitasi yang layak Kementerian Kesehatan
		Air Bersih	Rumah tangga dengan kondisi akses pada sumber air minum yang tidak layak	Rumah tangga dengan sumber air minum berasal dari sumur tak terlindung, mata air tak terlindung, air sungai, air hujan dan lainnya.	MDGs 2015 dan standar sumber air bersih BPS.
		Akses pada layanan kesehatan maternal (persalinan)	Rumah tangga yang istri melahirkan di tolong oleh tenaga non medis (tidak akses pada layanan kesehatan maternal)	Rumah tangga yang istri di saat melahirkan di tolong oleh dukun bersalin, famili/keluarga dan tenaga penolong kelahiran lainnya (non medis)	Standar Penolongan Persalinan Kementerian Kesehatan
		Asupan Gizi Seimbang pada Balita	Rumah tangga yang memiliki balita dengan kualitas asupan gizi tidak seimbang	Rumah tangga yang memiliki balita dengan asupan gizi tidak seimbang	Standar Asupan Gizi Seimbang, Kementerian Kesehatan.
2	Pendidikan	Akses kepada layanan pendidikan dasar dan menengah	Rumah tangga yang memiliki anak usia sekolah dasar dan menengah yang tidak akses ke layanan pendidikan	Rumah tangga yang memiliki anak usia sekolah dasar dan menengah yang tidak akses ke layanan pendidikan dasar dan menengah (tidak bersekolah dan drop out)	Program Wajib Belajar 12 Tahun (RPJMN 2015 – 2019)
		Melek Huruf	Rumah tangga yang memiliki anggota keluarga yang berada di usia produktif (15-64 tahun) tidak memiliki kemampuan membaca dan menulis	Rumah tangga yang memiliki anggota keluarga yang berada di usia produktif (15-64 tahun) tidak mampu membaca dan menulis.	MDGs 2015 dan Human Development Index (UNDP)
		Akses kepada layanan pendidikan pra sekolah	Rumah tangga yang memiliki anggota keluarga usia pendidikan pra sekolah (3-6 tahun) tidak akses pada layanan pendidikan pra sekolah (PAUD)	Rumah tangga yang memiliki anggota keluarga usia pendidikan pra sekolah (3-6 tahun) tidak akses pada layanan pendidikan pra sekolah seperti PAUD, pos setara PAUD lainnya, Taman Kanak – Kanak (TK) atau setara, kelompok bermain dan jenis pendidikan pra sekolah lainnya.	Program Pendidikan Pra Sekolah Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan
3	Standar Kualitas Hidup	Sumber Penerangan	Rumah tangga yang tidak akses ke sumber penerangan listrik (PLN)	Rumah tangga dengan jenis sumber penerangannya listrik non PLN, petromax/aladin, pelita/senter/obor, lainnya serta listrik PLN tanpa meteran dan daya 450 watt dan 900 watt.	Standar PLN dan kebijakan subsidi listrik pemerintah.
		Bahan Bakar/Energi untuk Memasak	Rumah tangga dengan kondisi bahan bakar/energy untuk memasak yang tidak layak	Rumah tangga dengan jenis bahan bakar/energi untuk memasak terdiri dari minyak tanah, arang, breket, kayu bakar dan lainnya.	Standar BPS
		Kondisi Atap, Lantai dan Dinding Rumah	Rumah tangga dengan jenis atap, lantai dan dinding rumah yang tidak memenuhi standar hidup layak	Rumah tangga dengan jenis atap rumah ijuk/rumbia dan lainnya; jenis lantai rumah tanah dan lainnya dan jenis dinding rumah bambu dan lainnya.	Standar Kementerian Perumahan Rakyat (Rumah Layak Huni)
		Kepemilikan Aset	Rumah tangga yang tidak memiliki asset perumahan	Rumah tangga yang tidak memiliki asset perumahan; kontrak, sewa, bebas sewa milik orang lain, bebas sewa milik orang tua/sanak/saudara dan lainnya.	-

Sesuai dengan metode Alkire – Foster, setiap dimensi dan indikator diberikan bobot. Metode pembobotan dipakai rata – rata setiap dimensi dan indikator. Untuk bobot dimensi dan indikator MPI Indonesia tersaji pada tabel disamping ini:

Secara sederhana perhitungan MPI dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

Catatan:

- Skor setiap orang dalam rumah tangga, contoh RT 1 adalah: $(2 \times 0.083) = 0.166$
- Angka kemiskinan multidimensi (H) = $(7+4) : (4+7+5+4) = 0.550$
- Intensitas kemiskinan multidimensi (A) = $(0 \times 4) + (0.803 \times 7) + (0 \times 5) + (0.748 \times 4) : (7+4) = 0.783$
- $MPI = H \times A = 0.550 \times 0.783 = 0.4037$

Tabel 2 Bobot Dimensi dan Indikator MPI Indonesia

Dimensi (Bobot)	Indikator (Bobot)
Kesehatan (1/3)	Sanitasi (1/12)
	Air Bersih (1/12)
	Akses pada layanan kesehatan maternal (persalinan) (1/12)
	Asupan Gizi Seimbang pada Balita (1/12)
Pendidikan (1/3)	Akses kepada layanan pendidikan dasar dan menengah (1/9)
	Melek Huruf (1/9)
	Akses kepada layanan pendidikan pra sekolah (1/9)
Standar Kualitas Hidup (1/3)	Sumber Penerangan (1/12)
	Bahan Bakar/Energi untuk Memasak (1/12)
	Kondisi Atap, Lantai dan Dinding Rumah (1/12)
	Kepemilikan Aset (1/12)

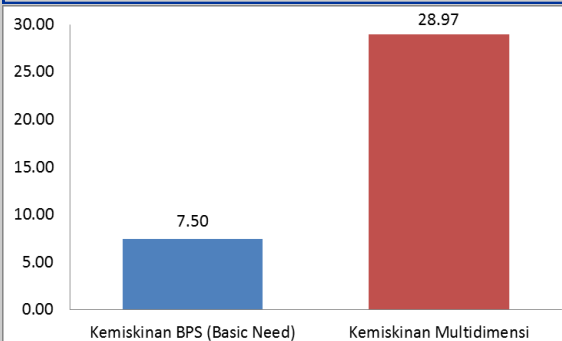
Tabel 3 Contoh Perhitungan MPI Indonesia

Dimensi dan Indikator	Individu dalam Rumah Tangga Sampel				Bobot
	1	2	3	4	
Ukuran dalam rumah tangga sampel	4	7	5	4	
Dimensi Kesehatan:					
Sanitasi	0	1	0	1	$1/12 = 0.083$
Air Bersih	0	1	0	0	$1/12 = 0.083$
Akses pada layanan kesehatan maternal (persalinan)	1	1	0	0	$1/12 = 0.083$
Asupan Gizi Seimbang pada Balita	1	1	1	1	$1/12 = 0.083$
Dimensi Pendidikan:					
Akses kepada layanan pendidikan dasar dan menengah	0	0	1	1	$1/9 = 0.111$
Melek Huruf	0	1	1	1	$1/9 = 0.111$
Akses kepada layanan pendidikan pra sekolah	0	1	0	1	$1/9 = 0.111$
Dimensi Standar Kualitas Hidup:					
Sumber Penerangan	0	0	0	0	$1/12 = 0.083$
Bahan Bakar/Energi untuk Memasak	0	1	0	1	$1/12 = 0.083$
Kondisi Atap, Lantai dan Dinding Rumah	0	1	0	1	$1/12 = 0.083$
Kepemilikan Aset	0	1	0	1	$1/12 = 0.083$
Skor	0.166	0.803	0.305	0.748	
Apakah masuk kategori miskin MPI ($c1 \geq 1/3 = 0.333$)	No	Ya	No	Ya	
Sensor skor ($c1$)	0	0.803	0	0.748	

Kemiskinan Multidimensi Di Kabupaten Indragiri Hulu

Hasil perhitungan kemiskinan multidimensi menunjukkan perbedaan yang signifikan antara pendekatan perhitungan kemiskinan yang dilakukan oleh BPS dengan metode basic need dengan pendekatan kemiskinan multidimensi. Jika, hasil perhitungan BPS menunjukkan angka kemiskinan di Kabupaten Inhu sebesar 7,50% sedangkan hasil perhitungan kemiskinan multidimensi dengan basis data yang sama menunjukkan angka 28,97%.

Gambar 2
Perbedaan Angka Kemiskinan BPS (Basic Need)
dengan Multidimensi di Kabupaten Indragiri Hulu



Sumber: Perkumpulan Prakarsa, 2015 (diolah Susenas, 2013)

Perbedaan mencolok ini bagi Pemerintah Daerah tentu mendapatkan reaksi yang beragam. Jika, argumentasi politik digunakan untuk melihat kondisi ini, jelas tidak mudah bagi pemerintah menggunakan basis data kemiskinan multidimensi. Karena, ini akan berdampak terhadap indikator kinerja pemerintah. Tapi, jika pemerintah berupaya mengoptimalkan program penanggulangan kemiskinan agar mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat ke arah yang lebih luas maka data ini sangat efektif untuk digunakan sebagai basis data untuk penanggulangan kemiskinan di Kabupaten Indragiri Hulu.

Jika di potret lebih luas dalam skala Propinsi, sebenarnya hal yang terjadi di Kabupaten Indragiri Hulu juga dialami oleh semua kabupaten/kota di Propinsi Riau. Semua kabupaten/kota ketika angka kemiskinan menggunakan pendekatan kemiskinan multidimensi mengalami peningkatan angka kemiskinan. Dan, posisi Kabupaten Indragiri Hulu sendiri relatif lebih baik dibanding kabupaten/kota lain di Propinsi Riau. Yaitu berada pada urutan keenam, kabupaten/kota dengan angka kemiskinan multidimensi terendah di Propinsi Riau.

Tabel 4
Perbandingan Kemiskinan Multidimensi di Propinsi Riau

KABUPATEN/KOTA		Jumlah RT Miskin	Angka Kemiskinan Multidimensi (H)	Intensitas Kemiskinan Multidimensi (A)	Indeks Kemiskinan Multidimensi (MPI)
1401	Kab. Kuantan Senggigi	22.737	30,29	0,4298	0,1302
1402	Kab. Indragiri Hulu	27.781	28,97	0,4158	0,1204
1403	Kab. Indragiri Hilir	86.052	50,83	0,4200	0,2135
1404	Kab. Pelalawan	31.185	34,34	0,4085	0,1403
1405	Kab. Si a k	28.247	26,99	0,3867	0,1044
1406	Kab. Kampar	38.008	20,75	0,4278	0,0888
1407	Kab. Rokan Hulu	50.434	37,65	0,4241	0,1597
1408	Kab. Bengkalis	34.356	27,11	0,4042	0,1096
1409	Kab. Rokan Hilir	47.689	34,94	0,4208	0,1471
1410	Kab. Kepulauan Meranti	18.579	43,63	0,4259	0,1858
1471	Kota Pekanbaru	55.937	22,75	0,3921	0,0892
1473	Kota Dumai	11.676	18,40	0,3891	0,0716
RIAU		452.680			

Sumber: Perkumpulan Prakarsa, 2015 (diolah Susenas, 2013)

Dilihat data diatas, menunjukkan ada sekitar 27.781 rumah tangga miskin multidimensi di Kabupaten Indragiri Hulu. Dengan angka kemiskinan multidimensi mencapai 28,97%. Tingka intensitas kemiskinan multidimensi di Kabupaten Ini juga tergolong tinggi mencapai 0,4148% .

Kabupaten Indragiri Hulu berada pada urutan angka kemiskinan multidimensi ke enam tertinggi di Propinsi Riau.

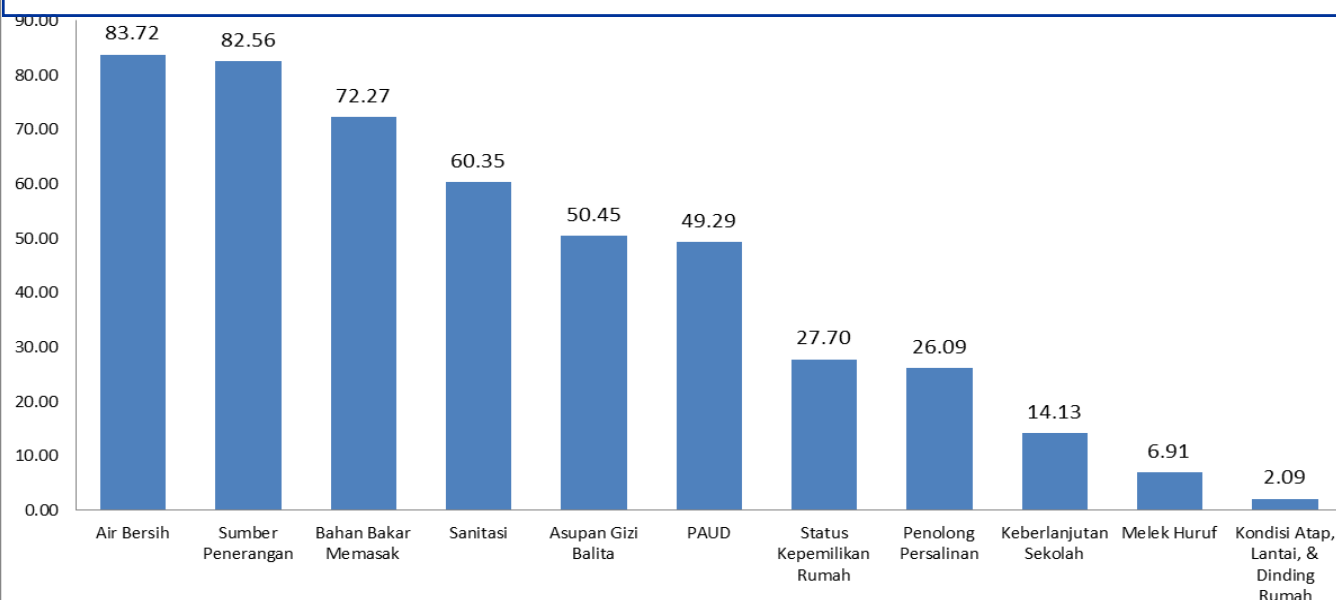
Karakteristik Kemiskinan Multidimensi Kabupaten Indragiri Hulu

Menarik dari data kemiskinan multidimensi, pemerintah daerah bisa dengan jelas melihat karakteristik kemiskinan yang terjadi di daerah. Gambar 3 dibawah ini menggambarkan bagaimana kondisi karakteristik kemiskinan multidimensi di Kabupaten Indragiri Hulu. Terdapat 6 (enam) hal utama yang menunjukkan karakteristik kemiskinan di Kabupaten Indragiri Hulu yaitu (a) masih banyak rumah tangga miskin yang tidak memiliki akses kepada air bersih, (b) masih banyak rumah tangga miskin yang tidak memiliki sumber penerangan yang memadai, (c) penggunaan bahan bakar memasak yang tidak layak, (d) sanitasi yang sangat buruk, (e) rendahnya asupan gizi balita di rumah tangga miskin dan (f) rendahnya akses pendidikan masyarakat miskin terhadap

pelayanan PAUD.

Jika melihat kondisi tersebut, jelas ini persoalan kemiskinan struktural yang terjadi dalam rumah tangga miskin di Kabupaten Indragiri Hulu. Kemiskinan struktural ini sangat erat kaitannya ketidakmampuan masyarakat miskin terhadap standar kehidupan yang layak seperti pendidikan, kesehatan dan lingkungan. Ini menjadi rumit, jika selama ini program penanggulangan kemiskinan yang sudah dilakukan oleh pemerintah daerah hanya berbasis pada perbaikan ekonomi. Padahal, kemiskinan struktural tidak bisa hanya menuntaskan persoalan ekonomi tapi harus menyentuh hal – hal peningkatan kapasitas modal manusia (*human capital*).

Gambar 3 Karakteristik Kemiskinan Multidimensi di Kabupaten Indragiri Hulu



Sumber: Perkumpulan Prakarsa, 2015 (diolah Susenas, 2013)

Dari 11 (sebelas) karakteristik kemiskinan multidimensi, yang paling dominan mempengaruhi kemiskinan di kabupaten Indragiri Hulu adalah persoalan sanitasi. Terdapat sekitar 23.257 RTM yang tidak mempunyai akses air bersih, kemudian terdapat 22.935 RTM yang tidak memiliki akses penerangan yang memadai dan terdapat 20.007 RTM dengan penggunaan bahan bakar memasak yang tidak layak. Selengkapnya dapat dilihat pada tabel 5.

Penggunaan basis data kemiskinan multidimensi ini bisa dilakukan oleh pemerintah daerah. Data ini bisa digunakan untuk mendesain program penanggulangan kemiskinan sesuai dengan karakteristik yang ada. Tinggal, pemerintah menetapkan berapa target program yang mampu dilakukan oleh pemerintah daerah setiap tahunnya. Dan ini bisa terus dipantau dan dievaluasi perkembangannya. Begitu juga dengan data lain yang disajikan dibawah ini. Bisa dimanfaatkan untuk optimalisasi program dan mengintegrasikan program penanggulangan kemiskinan di Kabupaten Indragiri Hulu.

Tabel 5
Jumlah RTM Menurut Karakteristik Kemiskinan Multidimensi di Kabupaten Indragiri Hulu

Karakteristik Kemiskinan	Jumlah RT Miksin
Air Bersih	23,257
Sumber Penerangan	22,935
Bahan Bakar Memasak	20,077
Sanitasi	16,765
Asupan Gizi Balita	14,016
PAUD	13,693
Status Kepemilikan Rumah	7,696
Penolong Persalinan	7,247
Keberlanjutan Sekolah	3,925
Melek Huruf	1,919
Kondisi Atap, Lantai, & Dinding Rumah	581

Rekomendasi

Dari data dan informasi kemiskinan multidimensi sasaran penanggulangan kemiskinan yang menjadi dasar perencanaan daerah dalam penanggulangan kemiskinan multidimensi dibagi menjadi tiga, yaitu:

Sasaran Prioritas Utama

- Akses Terhadap Air Bersih
- Sumber Penerangan
- Bahan Bakar Memasak
- Sanitasi
- Asupan Gizi Seimbang pada Balita
- Akses Terhadap layanan pendidikan pra sekolah (PAU)

Sasaran Prioritas Kedua

- Status Kepemilikan Rumah
- Akses Pelayanan Persalinan
- Keberlanjutan Pendidikan

Sasaran Prioritas Ketiga

- Melek Huruf
- Kondisi Atap, Lantai dan Dinding Rumah

Berdasarkan target sasaran penanggulangan kemiskinan diatas, maka strategi program penanggulangan kemiskinan yang harus dilakukan Pemerintah Daerah

Kabupaten Indragiri Hulu adalah sebagai berikut :

Program Prioritas Utama

- Perbaikan akses rumah tangga miskin terhadap air bersih di kota dan didesa
- Peningkatan akses penerangan (listrik) rumah tangga miskin di wilayah perdesaan
- Perbaikan pada akses bahan bakar memasak rumah tangga miskin
- Perbaikan sanitasi rumah tangga miskin
- Perbaikan asupan gizi berimbang balita rumah tangga miskin
- Peningkatan akses anak dari rumah tangga miskin (usia 3-6 tahun) terhadap PAUD

Program Prioritas Kedua

- Penyediaan rumah bersubsidi dan sertifikasi tanah bagi rumah tangga miskin (kota dan desa)
- Peningkatan akses anak usia sekolah rumah tangga miskin terutama bagi mereka yang tidak ada akses ke pendidikan
- Peningkatan akses persalinan rumah tangga miskin oleh tenaga kesehatan

Program Prioritas Ketiga

- Peningkatan kemampuan membaca – menulis rumah tangga miskin yang buta huruf
- Perbaikan perumahan bagi rumah tangga miskin.

FITRA RIAU

Jalan : Kartama/Inpers Gg. Bambu Nomor 5 Kel. Maharatu
Kec. Marpoyan Damai Pekanbaru web: www.fitrariau.org
sekretariat.fitrariau@gmail.com Telpon : 0761 - 566833.

PWYP INDONESIA

Jalan : Tebet Utara II C No. 22B Jakarta Selatan 12810
T/F: 021-8355560 | Email: sekretariat@pwyp-indonesia.org

Ditulis Oleh :

Trim FITRA Riau

Program RCC Wilayah Indragiri Hulu